



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Helfin bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Molawe, 22 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I;

Anissa Fitri Wulandari binti bahrun, tempat dan tanggal lahir Sorong, 21 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2025/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 23 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jeka usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian menyerahkan kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) keturunan, bernama :
 - Zulaikha Humairah binti Helfin, Umur 4 tahun
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Tidak Mendaftarkan pernikahan ke KUA dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk menerbitkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal, 23 September 2020, Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Molawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Molawe;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2025 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Helfin bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Anissa Fitri Wulandari binti Bahrin**) yang dilangsungkan pada tanggal, 23 September 2020 Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2025;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. Helfian bin Ahmad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tapungaya, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir saat pernikahan para Pemohon, dan saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 23 September 2020 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan untuk kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000 dibayar tunai, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Zulaikha Humairah binti Helfin, Umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon pada saat itu tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan administrasi kependudukan yang lainnya;

2. Helmalia binti Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, dan saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 23 September 2020 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan untuk kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000 dibayar tunai, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Zulaikha Humairah binti Helfin, Umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon pada saat itu tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan surat nikah yang resmi untuk keperluan pengurusan Buku Nikah dan administrasi kependudukan yang lainnya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 September 2020 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dan bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan untuk kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, kemudian yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa, dibayar tunai, dan sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2020 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, dan bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan untuk kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, kemudian yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000 dibayar tunai, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan; tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak : Zulaikha Humairah binti Helfin, Umur 4 tahun, dan para Pemohon saat ini belum mempunyai Buku Nikah karena pada saat itu tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat; dan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 23 September 2020 di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelumnya dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



selanjutnya diserahkan untuk kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, masing-masing beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Zulaikha Humairah binti Helfin, Umur 4 tahun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda dan sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon saat ini belum mempunyai Buku Nikah karena pada saat itu tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Doddy Sahril karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan untuk kepada Yunus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, kemudian yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Haldin dan Arif Hidayatullah dengan mas kawin Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم
الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن
سفل

Artinya: yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian ayah sekandung, kemudian ayah seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di Kelurahan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha atas pembebasan biaya perkara, maka para Pemohon dibebaskan untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dan membebaskan biaya Perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2025;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Helfin bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Anissa Fitri Wulandari binti Bahrin**) yang dilangsungkan pada tanggal, 23 September 2020 Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2025;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah oleh Sudirman M, S.H.I.,M.E sebagai Ketua Majelis, Drs.H Abdul Kadir Wahab,S.H, M.H dan Nurul Aini, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Drs.H Abdul Kadir Wahab,S.H, M.H

Sudirman M, S.H.I.,M.E

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Aini, S.HI, M.H

Panitera

Pengganti,

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	,00

(Nihil).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)